



SURYA/SYLVIANITA WIDIYAWATI

**PROF INTAN AHMAD PHD**



**November ini saya akan kumpulkan para Warek III untuk membicarakan teknis pembentukan UKM itu.**

**PROF INTAN AHMAD PHD**  
DIRJEN PEMBELAJARAN DAN  
KEMAHASISWAAN

## Kampus Tunggu Juknis UKM Bina Ideologi

**MALANG, SURYA** - Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Prof Intan Ahmad PhD, menyatakan akan mengumpulkan para Wakil Rektor (Warek) III terkait pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pembinaan Ideologi Bangsa (PIB) di kampus. Ini menindaklanjuti keluarnya Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) No 55/2018.

"November ini saya akan kumpulkan para Warek III untuk membicarakan teknis pembentukan UKM itu," jelas Intan usai melantik pengurus Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (Bapomi) Provinsi Jatim periode 2018-2021 di Universitas Negeri Malang (UM), Rabu (31/10).

Tidak semua perguruan tinggi (PT) nantinya ada UKM ini. Karena di Indonesia ada sekitar 4.000 PT. Namun, yang jelas pembentukan UKM ini penting karena radikalisme merupakan hal serius, sehingga perlu ada pikiran-pikiran dari kampus mengenai konsesus kebangsaan yang harus dijaga yaitu tentang NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

Mahasiswa yang juga ikut organisasi eksternal boleh ikut di UKM ini, namun dia tidak boleh berpolitik praktis di organisasi kemahasiswaan itu. Terkait ini, Dr Syamsul Hadi MPd MEd, Warek III UM, berpendapat memilih menunggu petunjuk teknisnya.

"Saat pertemuan Forum Rektor Jawa Timur di Jember baru-baru ini juga membahas Permenristek Dikti ini. Sikapnya akan menunggu kajian. Apalagi kami juga belum mendapatkan dokumen Permenristek Dikti yang baru itu," papar Syamsul Hadi. Di tempat terpisah, Kapolres Malang,

## Kampus...

■ DARI HALAMAN 9

AKBP Yade Setiawan Ujung, mengungkap jumlah simpatisan dan eks anggota HTI di Kabupaten Malang yang mulai menurun. Saat ini, diprediksi jumlahnya kurang dari 200 orang. Ujung mengatakan, sebelum organisasi itu resmi dilarang oleh pemerintah pada 2017, jumlahnya terdeteksi ada 275 anggota.

"Kegiatan mereka semenjak dibubarkan memang tidak aktif. Tetapi eks anggota dan simpatisan perlu kami rangkul dan beri pemahaman supaya kembali ke NKRI," ujar Ujung, Rabu (31/10).

Polres Malang tetap melakukan pengawasan di sejumlah tempat. Dikatakan Ujung, ada delapan kecamatan yang menjadi kantong keberadaan eks anggota HTI. Polres Malang menggandeng tokoh agama dan masyarakat untuk merangkul eks anggota HTI di

Kabupaten Malang. Mereka diajak dialog sebagai upaya untuk pendekatan.

"Tidak perlu mereka dikucilkan. Kita harus dialog karena pola pikirnya yang diubah agar tidak mengusung konsep khilafah," kata Ujung saat menghadiri seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Ta'lif wan Nasyr (LTN) PC NU Kabupaten Malang di Hotel Radho, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, kemarin.

Di sisi lain, Ujung juga menjelaskan kalau HTI du-

lunya kerap masuk melalui kampus untuk menyebarkan paham yang mereka usung. Mereka menasar mahasiswa baru yang masih labil. Saat ini, Polres Malang juga tengah memantau sejumlah kampus agar tidak terpengaruh konsep HTI.

"Ya itu kan hasil intelijen yang kami dapat. Kami pantau beberapa universitas meskipun tidak etis kami sebutkan. Kami beri warna kuning yang artinya diawasi," tegas Ujung. **(vie/bni)**